

## TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PIDIE

**Rizal Mahfud**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur

Email: Rizalmd12@gmail.com

### Abstract

*Political parties are a means for citizens to participate or participate in the process of managing the country. Political parties are very familiar with the community environment. The large number of politicians caught in legal cases and sentenced has made people apathetic and some don't even trust political parties anymore. This bad perception is also due to the increasing openness of the public to access political information along with the rise of the internet and social media. Political parties seem to forget their function. However, not all political parties have a bad view in the eyes of society, there are still many political parties that carry out their roles and functions properly. This is what prompted the author to examine and examine how the level of public trust in the democratic party level in Pidie district. The Formulation of the Problem: What is the level of public trust in political parties in Pidie Regency? And the factors that influence the level of public trust in political parties in Pidie Regency?.*

*In this study, the authors used a qualitative approach. The findings showed that the level of trust of the people of Pidie Regency in political parties was relatively low. And the inhibiting resources that affect the high rate of people not using their right to vote in regional head elections at the provincial and district levels are influenced by the high level of corruption among political actors, socio-economic factors, political system factors, low public trust in political parties, and public apathy. regarding the election of regional heads at the provincial level and in Pidie Regency and the suggestions that can be given are: The need for an active role of political actors in protecting the community so that people are not apathetic towards political knowledge in the area, this is to regain public trust as voters and political actors as elected .*

**Keyword: Trust, Society, Against, Party, Politics**

### Abstrak

*Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik sudah sangat akrab dengan lingkungan masyarakat. Banyaknya politisi-politisi terjerat kasus hukum dan dipidana membuat masyarakat menjadi apatis dan sebagian bahkan tidak percaya lagi dengan partai politik. Persepsi buruk ini juga disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya internet dan media sosial. Partai politik seperti melupakan fungsinya. Namun tidak semua partai politik memiliki pandangan yang buruk dimata masyarakat masih banyak partai politik yang menjalankan peran dan fungsinya dengan benar. Inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai demokrat tingkat di kabupaten pidie. Adapun Rumusan Masalah: Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Kabupaten Pidie? Dan Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Kabupaten Pidie?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Hasil temuannya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Pidie terhadap partai politik relatif rendah, ini tercermin pada kecenderungan meningkatkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan calon kepala daerah tingkat propinsi maupun tingkat kota di wilayah Kabupaten Pidie. Dan sumber daya penghambat yang mempengaruhi tingginya masyarakat tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah tingkat propinsi maupun tangka kabupaten dipengaruhi oleh tingginya tingkat korupsi para aktor-aktor politik, sosial ekonomi, faktor sistem politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan sikap apatis masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah tingkat propinsi maupun di Kabupaten Pidiedan saran yang dapat di berikan ialah: Perlunya peran aktif actor politik dalam mengayomi masyarakat dalam agar masyarakat tidak apatis terhadap pengetahuan politik di daerah hal ini untuk mendapatkan Kembali kepercayaan masyarakat sebagai pemilih dan actor politik sebagai yang di pilih.*

**Kata kunci: Kepercayaan, Masyarakat, Terhadap, Partai, Politik**

## PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara pastinya membutuhkan suatu sistem pemerintahan. Sistem tersebut lebih dikenal dengan sistem perpolitikan. Politik merupakan serangkaian kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (Budiarjo, 1977). Politik tidak bisa dilepaskan dari proses mencapai tujuan negara dengan berbagai macam aktifitas politik yang dilaksanakan.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang sistem pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu ciri-ciri demokrasinya adalah setiap anggota masyarakatnya ikut partisipasi dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum terdapat organisasi-organisasi yang dibentuk dengan tujuan dan kehendak serta cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia melindungi warga negaranya dengan memberikan hak-haknya, salah satunya yaitu hak politik. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk dapat ikut serta dalam membangun pemerintahan. Hak ini dipayungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), menyebutkan secara tegas bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan." Ini berarti bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak setara dalam segala bentuk kehidupan di masyarakat.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik sudah sangat akrab dengan lingkungan masyarakat. Sebagai lembaga politik partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan penguasa. Namun pada akhir-akhir ini terjadi krisis kepercayaan terhadap partai politik yang disebabkan oleh perilaku para elit politik yang buruk dimata masyarakat. Banyaknya politisi-politisi terjerat kasus hukum dan dipidana membuat masyarakat menjadi apatis dan sebagian bahkan tidak percaya lagi dengan partai politik. Persepsi buruk ini juga disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya internet dan media sosial.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik disebabkan oleh banyak kader politik

yang terjerat korupsi, tidak transparannya partai politik terhadap masyarakat, tidak adanya edukasi tentang politik kepada masyarakat, rekrutment politik tidak berjalan. Partai politik seperti melupakan fungsinya. Namun tidak semua partai politik memiliki pandangan yang buruk dimata masyarakat masih banyak partai politik yang menjalankan peran dan fungsinya dengan benar.

Inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai demokrat tingkat di kabupaten pidie.

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Kabupaten Pidie?
2. Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Kabupaten Pidie?.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2011: 6) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik Tingkat Di Kabupaten Pidie**

Pandangan masyarakat terhadap partai politik tentu berbeda-beda, tidak hanya penilaian masyarakat yang menilai positif namun juga tentu penilaian masyarakat yang menilai negatif. Begitu juga dengan pandangan masyarakat yang terjadi di desa, tentu berbeda dengan pandangan masyarakat yang ada di kota, tidak hanya dari segi pola pikir, latar belakang pendidikan, ekonomi dan sosial, tetapi juga dilihat dari perilaku masyarakat.

Masyarakat yang pendidikannya 55 rendah cenderung pendidikan politiknya rendah dan pengetahuan terhadap partai politik sangat rendah. Persepsi masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pidie menunjukkan hasil bahwa mereka mempunyai sikap politis, apatis, dan logis kepada partai politik. Fungsi partai politik dalam sosialisasi memberikan tanggapan terhadap partai politik terutama partai demokrat dalam melaksanakan fungsinya untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam memberikan pandangan politik yang sehat. Sedangkan dalam beberapa responden yang diberikan oleh masyarakat berdampak negatif terhadap partai politik dalam mensosialisasikan peran dan fungsinya. Tanggapan masyarakat yang pasif terhadap peran partai politik karena tidak berjalan baiknya peran dan fungsi partai politik menyebabkan masyarakat tidak yakin terhadap partai politik.

Untuk mengatasi pemasalahan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (golput) di perlukan langkah-langkah yang nyata dari pemerintah. Fenomena penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol harus segera di atasi. Parpol harus kembali pada fungsi awal parpol, parpol harus kembali pada kodratnya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan apa yang menjadi input dari masyarakat.

Parpol bukan hanya sekedar alat penggerak dukungan masyarakat untuk legitimasi kekuasaan tapi juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Untuk itu partai politik perlu melaksanakan fungsinyanya dengan benar dan tepat, yang meliputi: fungsi agregasi, fungsi artikulasi, fungsi edukasi dan fungsi rekrutmen.

#### Fungsi Agregasi

Agregasi merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen.

Fungsi agregasi kepentingan ini dapat tumpang tindih dengan fungsi artikulasi kepentingan. Berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula fungsi artikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi individu individu yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat untuk menjalankan fungsi agregasi kepentingan.

Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah suatu penyampaian pendapat yang dilakukan oleh seorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadikan suatu kebijaksanaan atau singkatnya pemerintah mau mendengarkan dan menuruti pendapat dari kalangan dibawahnya

#### Fungsi Artikulasi

Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidaknya-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.

Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga, badan-badan ataupun kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tadi dibentuk oleh pihak swasta (masyarakat sendiri) maupun yang dibentuk oleh pihak pemerintah, yang perlu diperhatikan di dalam hal ini adalah fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, badan-badan atau kelompok-kelompok didalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat. Seperti disebut diatas bahwa artikulasi kepentingan itu dilakukan oleh interest group. Interest group pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat.

Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Jadi dapat disimpulkan artikulasi kepentingan suatu pendapat yang disampaikan oleh seseorang atau banyak orang kepada pihak pemerintah namun tidak dijadikan suatu kebijaksanaan.

#### Fungsi Edukasi

Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan edukasi, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain atau cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai.

Untuk itu dibutuhkan lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di satu pihak, warga Negara memerlukan informasi minimal tentang hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara. Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan

eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu, yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik.

#### Fungsi Rekrutmen

Fungsi rekrutmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal : menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Sukarna (1990:34) mengatakan bahwa apabila pencalonan politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi kelanggengan partai politik. Proses rekrutmen dari parpol harus betulbetul diperbaiki, caranya, seleksinya. Jangan sembarang orang saja yang direkrut. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebaiknya jangan dipilih oleh parpol. Jadikan proses seleksi anggota parpol seperti bis sekolah. Jadi, jelas orangnya terdaftar, dididik. Jangan sampai orang-orang yang tidak profesional atau kompetensi dimasukkan dalam rekrutmen anggota parpol dan rekrutmen anggota dewan. Hanya dipilih karena uangnya banyak dan berpengaruh, tanpa memperhatikan moralnya. Jika itu yang terjadi, maka akan terjadi lagi suatu lingkaran dimana orang-orang yang tidak memenuhi kriteria itu juga akan 'memainkan' pemilihan anggota-anggota yudikatif. Harus tetap dengan prosedur-prosedur yang benar. Intinya, calon yang bersangkutan itu punya kejelasan visi, tahu apa tugas yang akan diembannya, dan bagaimana langkah-langkahnya. Selain itu, dia harus punya keahlian dan keberanian. Dia juga harus punya moral yang bagus dan mampu berkomunikasi. Menurut penulis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perlu konsistensi.

Fungsi merekrut orang untuk duduk sebagai wakil rakyat dan mempromosikan orang untuk menjadi pemimpin itu harus dijalankan dengan benar, namun yang dilakukan selama ini justru penyimpangan dan penyalahgunaan. Untuk itu, agar adanya perbaikan tingkah laku para politisi dan menjalankan fungsinya dengan benar. Untuk itu diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada partai politik agar mampu menumbuhkan pencitraan, dengan tindakan nyata untuk mensejahterakan rakyat, dengan mensejahterakan rakyat, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, maka tidak mustahil untuk periode berikut rakyatlah yang akan mengusung untuk tetap menjadi pemimpinnya.

#### **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Kabupaten Pidie**

Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tingginya tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum Golput

adalah singkatan dari Golongan Putih yaitu orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses Pemilihan Umum, baik karena sengaja maupun karena penyebab lainnya.

Menurut Surbakti (2014), menegaskan bahwa pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya.

Golput harus dilakukan sebagai sebuah kesadaran politik. Dengan pengkategorian seperti ini, tentu lebih sulit menelaah seberapa banyak pemilih yang secara sadar memilih menjadi golput. Dengan demikian, penghitungan mengenai jumlah golput riil pun akan semakin sulit dilakukan (Kompas, 10 Mei 2014).

Merujuk pedapat Arbi Sanit (2012) golput dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan para informan dapat diketahui bahwa factor-faktor yang berpenagruh terhadap tingginya Golput pada pemilihan umum di sebabkan oleh Korupsi Aktor-Aktor Politik, sosialisasi, Korupsi Aktor-Aktor Politik Korupsi telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasannya pun terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih (sophisticated). Korupsi mempunyai banyak segi dan dapat dipandang dari segi politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Korupsi yang melanda negara Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) serta menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membahayakan keberadaan negara.

Hal ini terjadi karena perilaku korupsi merusak berbagai macam tatanan, seperti tatanan hukum, tatanan politik, dan tatanan sosial budaya dari negara yang bersangkutan. Kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor politik menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai menurun, Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat.

Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Faktor Sosial-Ekonomi Sebagian besar para nonvoter berlatar belakang pendidikan memadai. Pendidikan tinggi cenderung aktif berpolitik, sebaliknya masyarakat berpendidikan rendah cenderung pasif. Tapi pada kenyataannya justru kalangan terdidik yang membuat terobosan mengkampanyekan golput. Hal ini, karena kalangan terdidik, menyadari tugas dan peran yang harus dimainkan, apalagi dirinya terlanjur menerima label pembela hak-hak sipil. Hubungan tingkat pendidikan dengan kehadiran memilih memang menunjukkan hubungan yang erat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuan dan akses informasi yang dimiliki, maka memungkinkan seseorang bersifat kritis. Mereka juga mengetahui praktek-praktek politik dan ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan, kejujuran, kebebasan dan demokrasi.

Pengetahuan semacam inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan untuk tidak memilih. Pendidikan yang tinggi memberikan respon yang kreatif terhadap beberapa fenomena politik yang muncul di tengah kehidupan masyarakat ketimbang masyarakat yang tidak terlalu baik tingkat pendidikannya. Dalam konteks demikian, pendidikan berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Selain tingkat pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama dan keadaan ekonomi, turut mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih pada saat pemilu. Artinya keadaan ekonomi, agama dan kelas sosial pemilih dapat menjadi alasan golput. Selama ini, ekonomi rendah, pekerja yang penghasilannya pas-pasan, cenderung tidak hadir ke tempat pemungutan suara dengan pertimbangan hari-hari mereka lebih dipentingkan mencari nafkah.

Bagi kelompok ini, golput bukan persoalan berani atau tidak berani menampilkan kelainan sikap politik, namun semata-mata faktor kebutuhan yang terlampaui besar bila dibandingkan dengan kebutuhan politik. Di era reformasi, golput tak selalu berasal dari ekonomi rendah, kalangan borjuis pun juga ambil bagian. Penghasilan yang cukup atau bahkan lebih dari sekedar cukup tak jaminan berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Kalangan borjuis tak terlalu peduli dengan politik, kecuali terdapat suatu kepentingan tertentu. Karena itu, waktu bagi mereka difungsikan untuk bekerja dan istirahat di hari libur seperti pemilu. Fenomena ini menunjukkan tidak adanya motivasi yang diakibatkan dari fenomena politik yang membosankan.

Faktor Sistem Politik Konsep sistem tidak semata dalam pengertian prosedur dan aturan main, tetapi lebih mengarah pada kebijakan pemerintah dan kinerjanya dalam merealisasikan berbagai menu kebijakan. Umumnya pendukung golput melihat sistem politik yang sedang dikembangkan rejim penguasa orde baru dan orde reformasi tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat elit maupun massa. Wajar bila masyarakat tak mau hadir ketempat pemungutan suara. Karena tak ada lagi kepercayaan atas sistem politik demikian. Partisipasi masyarakat akan tinggi bila pilar dan prinsip demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, sebaliknya partisipasi masyarakat akan menurun bila seluruh prinsip demokrasi dikhianati.

Faktor Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik Ketidakhadiran pemilih pada pesta demokrasi mesti memiliki pesan politik, setidaknya bentuk kejenuhan. Salah satu makna pesan tersebut adalah rasa apatis atau tidak percaya



terhadap hal-hal yang berbau politik. Ketidakpercayaan rakyat sebagai potret buram perpolitikan nasional. Sebab, tidak mungkin rakyat memberikan respon sebegitu sinis, jika hanya persoalan kecil, kekecewaan yang begitu besar disebabkan oleh hal-hal kecil yang terulang-ulang.

Hasil temuan penelitian Dwijayanto mengatakan mayoritas responden (67%) menganggap bahwa dengan dilaksanakannya Pilgub ini tidak akan membawa perubahan apapun baik terhadap provinsi maupun kehidupan mereka. Menurut mereka perhelatan semacam Pilgub ini hanyalah sebuah rutinitas politik saja tanpa menjanjikan suatu perubahan yang berarti.

Senada hasil penelitian di atas, hasil penelitian Aldila Wikan (2010) menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Golput (Tidak Memilih) Dalam Pemilihan Walikota Kota Semarang 2010, yaitu kurangnya sosialisasi dan himbauan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pemilihan umum, apatisme masyarakat yang timbul akibat kejenuhan terhadap perilaku elit politik dan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang sebuah pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan Walikota Semarang 2010, hanya bersifat simbolis.

Berikutnya penelitian Silalahi, Hariman (2011), mengatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya golput dilatar belakangi sosial ekonomi seperti pekerjaan, keluarga dan pendidikan sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat Kecamatan Tarutung dalam hal tidak ikut memilih pada saat pemilihan berlangsung dan masyarakat Kecamatan Tarutung tidak percaya Pemilu dapat memperbaiki keadaan Ekonomi masyarakat Kecamatan Tarutung. Factor nilai budaya berupa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun. Faktor-faktor tingginya golongan putih dalam pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh perilaku pemilih.

Seperti diungkapkan Surbakti (1992: 145), salah satunya yakni perilaku memilih didasari oleh lima pendekatan, yaitu:

Pendekatan Struktural, pendekatan ini melihat perilaku memilih sebagai hasil dari bentuk sosial yang luas cakupannya. Seperti jumlah partai, kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, sistem kepartaian, program kerja atau visi maupun misi yang diusung oleh partai, yang semuanya ini tentunya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya disebabkan karena adanya perbedaan basis sosial yang ada di masyarakat,

Pendekatan Sosial, yang cenderung menempatkan dan menghubungkan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Seperti latar belakang kependudukan dan sosial ekonomi, gender, wilayah bermukim, profesi, pendidikan, status sosial, tingkat pendapatan, serta agama. Kesemuanya itu dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perilaku memilih seseorang.

Perangsang politik ini diberikan untuk operasionalisasi dari mesin politik dan untuk maintenance konstituen. Jika hal ini tidak dilakukan jangan harap mesin politik (koalisi partai) dan konstituen bisa berjalan. Secara teknis mungkin banyak di ketahui di media massa bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat undangan dari PPS, dan lain-lain. Faktor-faktor yang di sebut sebelumnya mungkin di sebabkan karena sistem atau penyelenggara

pemilu. Faktor selanjutnya adalah faktor individu dengan alasan malas dan tidak memiliki calon yang memenuhi kriteria atau bisa mewakili kepentingannya,

Banyaknya alasan orang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum menandakan bahwa golput di Indonesia bukanlah suatu gerakan mayoritas yang terkonsolidasi dimana semua masyarakat memahami alasan ideologis untuk golput atau adanya kesepahaman bersama untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun Pemilu secara teknis telah berhasil dilaksanakan, namun partai-partai politik yang ada saat ini masih tetap belum mampu menjadi media representasi politik yang baik. Inilah salah satu masalah serius dimana representasi semu yang "seolah-olah" masih menjadi ciri dari sistem kepartaian yang oligarkis. Karena itu, representasi alternatif menjadi penting, bukan saja diwacanakan namun sekaligus dipromosikan untuk mengisi kekosongan dalam rangka memperbaiki model dan mekanisme perwakilan yang lebih representative

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil temuannya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Pidie terhadap partai politik relatif rendah, ini tercermin pada kecenderungan meningkatkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan calon kepala daerah tingkat propinsi maupun tingkat kota di wilayah Kabupaten Pidie. Dan sumber daya penghambat yang mempengaruhi tingginya masyarakat tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dipengaruhi oleh tingginya tingkat korupsi para aktor-aktor politik, sosial ekonomi, faktor sistem politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan sikap apatis masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah tingkat propinsi maupun di Kabupaten Pidie

### **Saran**

Perlunya peran aktif actor politik dalam mengayomi masyarakat dalam agar masyarakat tidak apatis terhadap pengetahuan politik di daerah hal ini untuk mendapatkan Kembali kepercayaan masyarakat sebagai pemilih dan actor politik sebagai yang di pilih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]Asgart, M. S. (2015). Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta: Fenomena Pemilu2004 dan 2009.Master Fisipol UGM, Yogyakarta.
- [2]Asrinaldi. (2012). Politik Masyarakat Miskin Kota. Gava Media. Yogyakarta.B. P, S. (2012). Penulisan Buku Teks Pelajaran, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.Bandung.
- [3]Efriza, A. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik.Bandung.
- [4]Hamdi. (2012). Pengantar Psikologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muluk.

- [5] HAW, W. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Jakarta.
- [6] Joko, P. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Infest, Yogyakarta.
- [7] K, Marselina. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)*
- [8] Kuhon, T. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desan Tonselama Kecamatan Tondano Utara*
- [9] Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip.
- [10] Mona. (2015). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Peraturan Pelaksananya*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Mahardika.